

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Faktor kepuasan kerja dijelaskan oleh Umam (2010) bahwa terdapat dua indikator yaitu adanya ciri-ciri instrinsik dan ekstrinsik dari suatu pekerjaan yang menentukan kepuasan kerja, yaitu keragaman, kesulitan, jumlah pekerjaan, tanggung jawab, otonomi, kendali terhadap metode kerja, kemajemukan dan kreativitas. Ciri-ciri tersebut disikapi oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi yang merupakan sumber daya manusia sebagai salah satu unsur yang menentukan tercapainya keberhasilan suatu organisasi. Kepuasan kerja pegawai dinilai sebagai salah satu faktor yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang juga dinilai sebagai unsur penentu kinerja pegawai, diantaranya komitmen dan keterikatan. Pemberdayaan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat komitmen diantaranya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pegawai pada wewenang yang diberikan secara konsisten dan jelas tentang peran, standar dan tujuan tentang penilaian terhadap kinerja karyawan. Apabila karyawan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, adanya pengalaman yang baik dalam bekerja dan adanya usaha yang sungguh-sungguh dari organisasi yang membantu karyawan belajar tentang organisasi dan pekerjaannya, maka akan tercipta komitmen pada organisasi tersebut.

Di Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang mengimplementasikan jabatan fungsional Polisi Kehutanan memiliki tugas dan fungsi pada pengamanan dan perlindungan hutan. Polisi Kehutanan merupakan ujung tombak pengamanan dan perlindungan hutan sehingga dituntut untuk selalu samapta dengan kondisi prima menghadapi dan mengatasi permasalahan di lapangan. Kondisi Polisi Kehutanan saat ini sebagian sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, namun sebagian lainnya belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu Polhut, namun dapat juga disebabkan oleh faktor eksternal Polhut, seperti aspek kelembagaan yang terkait dengan struktur pembinaan fungsionalitas tugas Polhut yang kurang memadai, sistem karier yang belum jelas (khususnya bagi polhut yang berlatar belakang S1 dan S2), pengembangan diklat sangat minim, dan dukungan sarana prasarana operasional belum memadai.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Hutan juga merupakan modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Menurut WWF (2012), hutan di Indonesia mempunyai kekayaan 38.000 jenis tanaman, 515 jenis mamalia (terbanyak di seluruh dunia), 511 jenis reptilia dan 1.513 jenis burung. Dalam kedudukannya sebagai sub sistem terpenting ketahanan lingkungan hidup atau penentu sistem penyangga kehidupan, hutan tropis Indonesia telah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu hutan tersebut harus dijaga kelestariannya. Disamping itu hutan tropis Indonesia mempunyai peranan penting sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, meskipun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Sebagaimana disebutkan dalam Laporan Tahunan Tahun 2011 Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan kewajiban Pemerintah sebagai konsekuensi penguasaan oleh negara atas sumber daya alam, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini dibebankan kepada Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA).

Berdasarkan data Direktorat Konservasi Kawasan dan Bina Hutan Lindung tahun 2011 disebutkan bahwa luas kawasan hutan Indonesia berdasarkan fungsi adalah 132 juta hektar (ha). Salah satu persoalan mendasar dalam membangun dan menjalankan organisasi dalam hal ini Direktorat Jenderal PHKA adalah kemampuan kepemimpinan dan juga aspek manusia (sumber daya manusia) yang bertugas dalam bidang konservasi alam dan lingkungan hidup di Indonesia. Wiratno (2005) menyampaikan pendapat bahwa gerakan konservasi alam dan lingkungan di Indonesia diantaranya menghadapi permasalahan pokok terkait dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas masih sangat terbatas, dalam hal sumber daya manusia yang memiliki komitmen kuat dalam membangun gerakan konservasi baik di tingkat kebijakan maupun lapangan. SDM yang bekerja di pemerintah (birokrasi) dihadapkan pada persoalan-persoalan diantaranya kapasitas kepemimpinan yang lemah, manajemen yang tidak terencana dengan baik, pemetaan persoalan yang kacau sementara kondisi lapangan berubah dengan cepat, kurangnya data dan informasi mutakhir, rendahnya kekompakan tim kerja, luasnya kawasan yang dikelola, pendanaan rutin maupun keproyekan yang selalu kurang dan juga minimnya mitra konservasi.

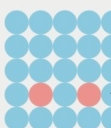
Kondisi hutan tropis Indonesia yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi. Semakin berkurangnya hutan tropis dapat menimbulkan ancaman terhadap punahnya beberapa spesies tertentu karena kehilangan habitatnya. Beberapa penyebab yang menimbulkan terjadinya degradasi hutan kita, antara lain illegal logging, penjarahan dan perambahan areal hutan, peredaran tumbuhan dan satwa liar secara illegal, penambangan tanpa ijin (penambangan emas, timah hitam, batubara dan sebagainya), kebakaran hutan, pengrusakan terumbu karang dan gangguan keamanan hutan lainnya. Permasalahan tersebut perlu segera ditangani secara serius dan berkesinambungan, sehingga kelestarian hutan dan ekosistemnya tetap terjaga dengan baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Menurut Hartono (2009), pengelolaan kawasan konservasi bersendikan tiga pilar yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Dalam prakteknya, karena berbagai alasan, pengelolaan kawasan konservasi belum dilakukan secara proporsional, kegiatan perlindungan dan pemanfaatan lebih dominan, aspek pengawetan relatif belum banyak disentuh. Tugas-tugas perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, kawasan konservasi beserta keanekaragaman hayati, hasil hutan dan peredaran hasil hutan di Indonesia sebagian besar bertumpu pada kapasitas Polisi Kehutanan (Polhut).

Di sisi lain gangguan keamanan hutan setiap saat terus terjadi dengan modus operandi yang canggih dan selalu berganti-ganti, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dan terpadu. Seperti halnya kasus-kasus illegal logging, setiap hari hutan hilang sekitar 3 -5 hektar atau setara 3 – 5 kali lapangan sepak bola, setara Rp. 83.000.000.000,- (delapan puluh tiga milyar rupiah) kerugian negara untuk setiap harinya (Sumber : Citra landsat 2.000). Menurut FAO (2012), laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 hektar per tahun atau setiap tahun luas areal hutan berkurang 1 persen.

Kerusakan hutan di atas disebabkan oleh banyak faktor, antara lain yaitu lemahnya mekanisme pengawasan pemanfaatan hutan, rendahnya kinerja perusahaan hutan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya penanganan gangguan keamanan hutan. Di samping itu kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan masih rendah, sehingga menimbulkan tekanan serius dalam pengelolaan hutan. Saat ini terdapat sekitar 10,2 juta masyarakat miskin sekitar hutan dan 6 juta masyarakat tersebut sepenuhnya hidup dari hasil hutan.

Dampak kerusakan hutan dapat menimbulkan munculnya beberapa bencana seperti timbulnya bahaya banjir, tanah longsor, punahnya jenis-jenis langka, penyebaran hama dan penyakit. Di samping itu dampak langsung yang dapat timbul adalah hilangnya pendapatan negara dari sektor kehutanan, terjadinya perubahan iklim, dan melemahnya kepercayaan investor asing ke Indonesia untuk menanam sahamnya karena issue pelestarian hutan dan lingkungan yang sensitif. Dampak lainnya yang muncul adalah timbulnya kerawanan sosial yang mengancam keutuhan pemerintahan serta kesejahteraan sosial yang semakin berkurang.

Sampai dengan Juli 2011, Polisi Kehutanan merupakan jabatan fungsional binaan Kementerian Kehutanan yang memiliki jenis jabatan tingkat terampil dengan jenjang jabatan tertinggi hanya sampai jenjang penyelia pada pangkat tertinggi hanya III d. Terdapat perbedaan jenis dan jenjang jabatan apabila dibandingkan dengan dua jabatan fungsional binaan Kementerian Kehutanan lainnya yaitu Pengendali Ekosistem Hutan dan Penyuluh Kehutanan. Kedua jabatan fungsional tersebut memiliki jenis jabatan tingkat terampil dan tingkat ahli serta mencapai jenjang Madya dengan pangkat maksimal IV c. Salah satu mekanisme pola karier Pegawai Negeri Sipil, menurut Badan Kepegawaian Negara adalah peluang perpindahan jabatan dari jabatan fungsional ke struktural baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal serta perpindahan wilayah kerja.

Terdapat teori yang dikutip oleh Thoha (1983) menyatakan bahwa perilaku seseorang sebenarnya dapat dikaji sebagai saling interaksinya atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



4

ketergantungannya beberapa unsur pokok yaitu motivasi dan tujuan sebagai suatu lingkaran. Atau menurut pendapat Fred Luthan dalam Thoha (1983) terdiri dari tiga unsur yaitu kebutuhan (*need*), dorongan (*drive*) dan tujuan (*goals*). Adanya beban kerja, tuntutan penanganan dan penyelesaian tugas pengamanan dan perlindungan hutan pada kawasan konservasi yang diembankan pada Polisi Kehutanan serta adanya permasalahan perbedaan jenis dan jenjang jabatan serta terbatasnya peluang perpindahan jabatan pada pola karier Pegawai Negeri Sipil khususnya bagi Polisi Kehutanan menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian dalam penyelesaian tugas akhir Program Magister ini. Adapun permasalahan tersebut di atas dikaitkan antara kepuasan kerja, komitmen dan keterikatan yang dimiliki oleh Polisi Kehutanan yang bekerja pada lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan dan kinerja yang diharapkan untuk kepentingan pencapaian tujuan tugas pengamanan dan perlindungan di kawasan konservasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada di Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Dalam rangka pencapaian salah satu program prioritas Kementerian Kehutanan di bidang pengamanan dan perlindungan hutan, peran Polisi Kehutanan sebagai ujung tombak kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan di lapangan perlu mendapat perhatian dari aspek kinerjanya. Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia terdapat banyak faktor yang memengaruhi kinerja, namun dengan mempertimbangkan bahwa saat ini di Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan sedang melakukan penyempurnaan jenjang jabatan Polisi Kehutanan yang dapat diindikasikan sebagai salah satu faktor kepuasan kerja, maka penelitian ini hanya dibatasi pada aspek kepuasan kerja, komitmen dan keterikatan Polisi Kehutanan terhadap kinerjanya.

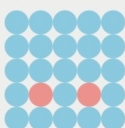
Berdasarkan batasan-batasan ini, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana pengaruh kepuasan kerja Polisi Kehutanan sebagai pejabat fungsional aparatur Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan terhadap kinerja Polisi Kehutanan?
- Bagaimana pengaruh komitmen yang dimiliki Polisi Kehutanan dalam melakukan tugasnya sebagai ujung tombak pengamanan dan perlindungan hutan di kawasan konservasi terhadap kinerja Polisi Kehutanan ?
- Bagaimana pengaruh keterikatan Polisi Kehutanan sebagai pejabat fungsional aparatur Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan terhadap kinerjanya ?
- Apa faktor yang paling dominan dari kepuasan kerja, komitmen dan keterikatan yang berpengaruh pada kinerja Polisi Kehutanan ?



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB, tahun 2013



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja Polisi Kehutanan sebagai pejabat fungsional aparatur Pegawai Negeri Sipil terhadap kinerjanya.
2. Menganalisis pengaruh komitmen yang dimiliki Polisi Kehutanan dalam melakukan tugasnya sebagai ujung tombak pengamanan dan perlindungan hutan di kawasan konservasi terhadap kinerjanya.
3. Menganalisis pengaruh keterikatan Polisi Kehutanan sebagai pejabat fungsional aparatur Pegawai Negeri Sipil terhadap kinerjanya.
4. Menganalisis faktor yang paling dominan dari kepuasan kerja, komitmen dan keterikatan yang berpengaruh pada kinerja Polisi Kehutanan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan dan kontribusi pemikiran bagi Direktorat Jenderal PHKA secara umum dalam menyusun dan mengusulkan penyempurnaan jabatan fungsional Polisi Kehutanan yang semula hanya tingkat terampil menjadi tingkat terampil dan tingkat ahli.
- b. Sebagai bahan pustaka untuk institusi pendidikan dan dapat dikaji untuk penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai sarana penulis mengaplikasikan keilmuan yang telah didapat selama masa perkuliahan

1.5 Ruang Lingkup

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Polisi Kehutanan yang bekerja pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan.

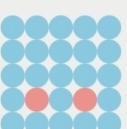
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.